



Model Collaborative Governance Berbasis Community-Bases Tourim dan Ekonomi Syariah pada Pengembangan Desa Wisata

Is Solikhatun ^{1*}, Teguh Imam Rahayu ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, Universitas Sultan Fatah Demak, Indonesia

Email: issolikhatun77@gmail.com ¹, teguhimam.01@gmail.com ²

*Penulis Korespondensi: issolikhatun77@gmail.com

Abstract. *Tourism village development requires collaboration among local government, tourism management institutions, communities, and local business actors so that tourism potential can generate sustainable social and economic benefit. This study aims to analyze the collaborative governance model based on Community-Based Tourism (CBT) and Islamic economic values in the development of Kampoeng Cemplongan Tourism Village, Kalianyar Village, Wonosalam District, Demak Regency. This research employed a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving village government representatives, tourism managers, BUMDes/ Pokdarwis, local MSMEs, visitors, and community representatives. The findings indicate that Kampoeng Cemplongan Tourism Village has developed through the involvement of multiple actors. The village government provides institutional support, BUMDEes and Pokdarwis contribute to tourism management, while local communities participate through tourism activities and the development of MSMEs around the tourism area. The tourism destination is currently opened mainly during particular community events, such as Syawalan and Apitan, creating opportunities for local businesses but limiting the continuity of economic benefits. The study proposes an adaptive collaborative governance model that integrates multi-actor collaboration, community participation, local economic empowerment, and Islamic economic values based on justice, mutual benefit, trust, and social welfare. The model can strengthen sustainable tourism village management while expanding community economic opportunities.*

Keywords: *Collaborative Governance; Community-Based Tourism; Islamic Economics; Local Economic Development; Tourism Village.*

Abstrak. Pengembangan desa wisata memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pengelola wisata, masyarakat, dan pelaku usaha lokal agar potensi wisata mampu menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis model collaborative governance berbasis Community-Based Tourism (CBT) dan nilai-nilai ekonomi syariah pada pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan, Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, pengelola wisata, BUMDes/Pokdarwis, pelaku UMKM, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan telah melibatkan berbagai aktor. Pemerintah desa memberikan dukungan kelembagaan, BUMDes dan Pokdarwis berperan dalam pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan wisata dan pengembangan UMKM di sekitar lokasi. Destinasi wisata saat ini lebih banyak dibuka pada momentum tertentu, seperti Syawalan dan Apitan, sehingga peluang ekonomi masyarakat mulai muncul tetapi manfaatnya belum berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian menghasilkan model collaborative governance adaptif yang mengintegrasikan kolaborasi multiaktor, partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, dan nilai ekonomi syariah berupa keadilan, kemanfaatan bersama, amanah, dan keberlanjutan. Model tersebut dapat menjadi dasar penguatan pengelolaan desa wisata dan perluasan peluang ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance; Community-Based Tourism; Desa Wisata; Ekonomi Lokal; Ekonomi Syariah.*

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi semakin diarahkan pada penguatan potensi lokal dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam

mengembangkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu bentuk pengembangan potensi lokal adalah desa wisata. Desa wisata menempatkan wilayah perdesaan sebagai ruang yang memiliki potensi alam, budaya, kehidupan sosial, dan aktivitas ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Pengembangan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih luas apabila masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi terlibat sebagai pelaku dalam pengelolaan destinasi.

Pendekatan Community-Based Tourism (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam proses pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat dapat berupa partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan daya tarik wisata, penyediaan produk dan jasa, serta pemanfaatan peluang ekonomi yang muncul dari kegiatan wisata. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun keberlanjutan desa wisata karena dapat memperkuat rasa memiliki, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan menjaga potensi lokal (Novandi & Adi, 2021; Wardani et al., 2023; Hariyadi et al., 2024).

Pengembangan desa wisata melibatkan berbagai kepentingan dan sumber daya sehingga membutuhkan mekanisme kerja sama yang mampu menghubungkan pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, dan pelaku ekonomi lokal. Konsep collaborative governance menjelaskan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan dan pengambilan keputusan bersama. Kolaborasi dibangun melalui interaksi, kepentingan bersama, kepercayaan, komitmen, serta pembagian peran antaraktor (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012).

Penelitian mengenai desa wisata di Indonesia memperlihatkan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam pengembangan destinasi. Molla et al. (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan desa wisata melalui collaborative governance dipengaruhi oleh kelembagaan, masyarakat, sumber daya manusia, kebijakan, dan kondisi lokal. Prasetyo (2023) juga menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi lintas sektor, sedangkan Prabawati dan Supriyanti (2023) menemukan bahwa kerja sama pemerintah, masyarakat, dan kelompok lainnya dapat mendukung pengembangan ekonomi wisata. Nurwanda et al. (2024) menegaskan bahwa pembangunan desa wisata belum sepenuhnya optimal ketika aktor-aktor yang terlibat masih bekerja secara terpisah.

Desa wisata mempunyai potensi untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan dapat menciptakan permintaan terhadap makanan, minuman, produk lokal, jasa, dan berbagai kebutuhan wisata lainnya. Penelitian Novandi dan Adi (2021) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal melalui CBT dapat memberikan manfaat terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian Palupi et al. (2024) di Desa Wisata

Penadaran, Kabupaten Grobogan, juga menunjukkan pentingnya pengemasan potensi wisata dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi syariah sebagai landasan nilai. Ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan produk halal, tetapi juga mengandung nilai keadilan, amanah, kemanfaatan bersama, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks pariwisata, pengembangan ekosistem halal juga membutuhkan keterhubungan antara berbagai aktor dan institusi sehingga nilai syariah dapat diterapkan dalam praktik ekonomi secara lebih nyata (Huda et al., 2022; Trishananto et al., 2024; Rachmiate et al., 2024).

Desa Wisata Kampoeng Cemplongan di Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak merupakan salah satu potensi wisata yang dikembangkan berdasarkan keunikan lokal berupa kawasan Cemplongan. Berdasarkan hasil wawancara, gagasan awal pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tempat wisata berasal dari kepala desa pada periode sebelumnya. Pengelolaan wisata mulai berjalan sekitar lima tahun terakhir hingga tahun 2025. Keunikan kawasan Cemplongan, khususnya keberadaan air yang menurut masyarakat tetap tersedia meskipun musim kemarau, menjadi salah satu daya tarik yang dinilai berbeda dari tempat lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BUMDes/Pokdarwis, kawasan wisata belum dibuka secara rutin setiap hari. Pembukaan lebih banyak dilakukan pada momentum tertentu, seperti Syawalan, Apitan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi wisata yang tersedia dengan pemanfaatan ekonomi yang dapat diterima masyarakat secara berkelanjutan. Pada saat kegiatan wisata dibuka, masyarakat mulai memperoleh peluang untuk berjualan di sekitar lokasi, tetapi pada hari biasa peluang tersebut belum berlangsung secara optimal.

Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pengembangan desa wisata tidak hanya membutuhkan objek wisata yang unik, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang mampu menjaga keberlanjutan aktivitas wisata dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pola kolaborasi pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku UMKM dalam pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas collaborative governance, CBT, dan partisipasi masyarakat secara terpisah. Penelitian tentang Desa Wisata Ciamis, misalnya, menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen antaraktor (Nurwanda et al., 2024). Penelitian tentang Kelor Tourism Village menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan berkontribusi terhadap

kemandirian ekonomi desa (Wardani et al., 2023). Penelitian Hariyadi et al. (2024) menunjukkan bahwa CBT dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Namun, penelitian yang mengintegrasikan collaborative governance, CBT, dan nilai ekonomi syariah dalam konteks desa wisata dengan potensi wisata lokal yang masih dibuka secara insidental masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pola collaborative governance dalam pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan, mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dan peluang ekonomi melalui pendekatan CBT, serta merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan kolaborasi antaraktor dan nilai ekonomi syariah.(Kurniawati, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang melibatkan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan keterlibatan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama yang berorientasi pada konsensus dan tujuan kolektif. Proses kolaborasi membutuhkan dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama.

Emerson et al. (2012) mengembangkan kerangka *collaborative governance* dengan menekankan dinamika kolaborasi, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama. Dalam pengembangan desa wisata, kerangka tersebut relevan karena pengelolaan destinasi melibatkan pemerintah desa, lembaga pengelola, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa *collaborative governance* menjadi penting dalam pengembangan desa wisata karena karakter pariwisata yang multidimensional. Nurwanda et al. (2024) menemukan bahwa kolaborasi yang belum didukung kepercayaan dan komitmen yang kuat dapat menyebabkan pengembangan desa wisata berjalan secara terpisah. Dengan demikian, *collaborative governance* dalam penelitian ini dipahami sebagai proses keterlibatan dan kerja sama antaraktor dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan.

Community-Based Tourism

Community-Based Tourism merupakan pendekatan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya

wisata. Masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari kegiatan wisata sekaligus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya.

CBT memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan ekonomi lokal. Novandi dan Adi (2021) menunjukkan bahwa CBT dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Wardani et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan langsung sebagai pengelola dan penyedia layanan wisata maupun keterlibatan tidak langsung melalui dukungan terhadap operasional destinasi. Dalam penelitian ini, CBT digunakan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat Desa Kalianyar dalam kegiatan wisata, khususnya kemunculan peluang usaha bagi UMKM setelah kawasan wisata mulai dikembangkan.

Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Desa Wisata

Ekonomi syariah merupakan pendekatan ekonomi yang tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menekankan keadilan, amanah, kemanfaatan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Dalam konteks pariwisata, nilai tersebut dapat menjadi landasan dalam pengelolaan hubungan ekonomi antara pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, pelaku UMKM, dan pengunjung (Ahyadi, 2025).

Kajian tentang wisata halal di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah memerlukan dukungan ekosistem, kelembagaan, dan koordinasi antaraktor (Huda et al., 2022; Rachmiate et al., 2024). Trishananto et al. (2024) menunjukkan bahwa kebijakan wisata halal di Indonesia berkaitan dengan penerapan prinsip Islam dalam penyediaan produk, layanan, dan tata kelola pariwisata.

Penelitian ini menunjukkan ekonomi syariah tidak diposisikan sebagai klaim bahwa Desa Wisata Kampoeng Cemplongan telah menjadi destinasi wisata halal secara formal. Nilai ekonomi syariah ditempatkan sebagai landasan normatif pengembangan model, terutama dalam aspek keadilan distribusi manfaat, kemanfaatan bersama, amanah dalam pengelolaan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Pembatasan ini penting agar penelitian tidak memberikan klaim yang melampaui data lapangan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan dan hubungan antaraktor yang terlibat di dalamnya. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena

dalam konteks nyata dengan memperhatikan kondisi sosial dan kelembagaan yang menyertainya (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Wisata Kampoeng Cemplongan, Desa Kalianyar, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Lokasi dipilih karena memiliki potensi wisata lokal yang unik dan telah dikembangkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat serta lembaga pengelola wisata.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pengembangan wisata. Informan mencakup pemerintah desa/perangkat desa, pengelola BUMDes/Pokdarwis, pelaku UMKM, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah pengembangan wisata, peran masing-masing aktor, kondisi operasional wisata, partisipasi masyarakat, peluang UMKM, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung pada kawasan wisata untuk melihat kondisi lokasi, aktivitas masyarakat, fasilitas, serta kegiatan yang berlangsung. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto dan catatan lapangan. Kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat interpretasi data melalui triangulasi teknik.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data wawancara direduksi berdasarkan tema utama penelitian, yaitu collaborative governance, CBT, peluang ekonomi masyarakat, dan nilai ekonomi syariah. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi tematik dan tabel ringkasan temuan. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola yang muncul secara konsisten dari data lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Awal Desa Wisata Kampoeng Cemplongan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan berawal dari gagasan kepala desa pada periode sebelumnya yang melihat keunikan kawasan Cemplongan dan potensi pemanfaatannya sebagai tempat wisata. Menurut hasil wawancara dengan pengelola BUMDes/Pokdarwis, pengembangan wisata tersebut mulai berjalan sekitar lima tahun terakhir hingga tahun 2025.

Keunikan utama yang menjadi daya tarik adalah keberadaan air di kawasan Cemplongan yang menurut informasi masyarakat tetap tersedia meskipun pada musim kemarau. Keunikan tersebut menjadi modal awal bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan kawasan sebagai destinasi wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata

tidak selalu harus dimulai dari pembangunan fasilitas yang kompleks, tetapi dapat berangkat dari identifikasi dan pemanfaatan karakteristik lokal yang dianggap unik oleh masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Hariyadi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa desa wisata dapat dikembangkan melalui pemanfaatan potensi lokal dan kearifan masyarakat. Palupi et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengembangan potensi desa perlu dikemas menjadi aktivitas wisata yang dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas.

Kampoeng Cemplongan memiliki keunikan sumber daya lokal telah menjadi titik awal pengembangan wisata. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan karena operasional wisata masih terbatas pada momentum tertentu.

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Desa Wisata

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan tidak dilakukan oleh satu pihak. Pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan dukungan terhadap keberadaan wisata, sedangkan BUMDes dan Pokdarwis terlibat dalam pengelolaan. Masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh ruang untuk terlibat dalam kegiatan wisata dan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.

Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya unsur *collaborative governance*. Pemerintah desa tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan lembaga pengelola dan masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata. Pola tersebut sesuai dengan pandangan Ansell dan Gash (2008) bahwa kolaborasi merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut masih berada dalam tahap penguatan. Koordinasi antarpihak belum sepenuhnya diwujudkan dalam sistem pengelolaan yang terstruktur, terutama berkaitan dengan jadwal operasional wisata dan pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut penting karena destinasi yang hanya aktif pada momentum tertentu akan membatasi kesempatan interaksi antarpihak dan mengurangi kontinuitas manfaat ekonomi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurwanda et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata membutuhkan kepercayaan, komitmen, dan koordinasi antaraktor. Prasetyo (2023) juga menunjukkan pentingnya partisipasi lintas sektor dalam pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, persoalan utama di Kampoeng Cemplongan bukan ketiadaan aktor, tetapi kebutuhan untuk memperkuat koordinasi dan mengubah kolaborasi yang bersifat insidental menjadi kolaborasi yang lebih berkelanjutan.

Keterbatasan Operasional Wisata dan Peluang Pengembangan

Berdasarkan wawancara dengan pengelola BUMDes/Pokdarwis, kawasan wisata lebih banyak dibuka pada momentum tertentu, seperti Syawalan, Apitan, dan kegiatan masyarakat lainnya. Pada hari biasa, kawasan belum dibuka secara rutin. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam pengembangan wisata karena potensi yang dimiliki belum dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Dalam wawancara, muncul masukan agar kawasan wisata dapat dibuka secara berkala, misalnya pada hari Minggu. Masukan tersebut diarahkan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk beraktivitas secara ekonomi, jumlah kunjungan dapat meningkat, dan UMKM dapat memperoleh peluang usaha yang lebih konsisten.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan operasional merupakan bagian penting dari model pengembangan Kampoeng Cemplongan. Potensi wisata yang hanya dibuka pada hari atau kegiatan tertentu membuat manfaat ekonomi masyarakat bergantung pada momentum kunjungan. Sebaliknya, pembukaan secara berkala berpotensi menciptakan pola ekonomi lokal yang lebih stabil. Penelitian Palupi et al. (2024) menunjukkan bahwa potensi desa wisata perlu dikemas menjadi aktivitas atau produk wisata yang dapat ditawarkan secara lebih terencana. Temuan tersebut relevan dengan Kampoeng Cemplongan karena keunikan kawasan telah tersedia, tetapi perlu diterjemahkan menjadi aktivitas wisata yang dapat berlangsung secara berkala.

***Community-Based Tourism* dan Peluang UMKM**

Temuan penting penelitian adalah munculnya peluang ekonomi masyarakat setelah kawasan wisata mulai dikembangkan. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM, sebelumnya belum terdapat pedagang di sekitar lokasi wisata. Setelah wisata mulai berjalan, mulai terdapat masyarakat yang berjualan di sekitar kawasan tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan destinasi wisata telah menciptakan ruang ekonomi baru bagi masyarakat. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan kedatangan pengunjung untuk menjual makanan, minuman, dan produk lainnya. Meskipun belum terdapat data kuantitatif mengenai peningkatan omzet, munculnya aktivitas perdagangan di sekitar lokasi merupakan indikator awal adanya manfaat ekonomi dari pengembangan wisata.

Kondisi tersebut menunjukkan implementasi prinsip CBT, yaitu masyarakat memperoleh kesempatan untuk terlibat dan menerima manfaat dari aktivitas wisata. Penelitian Wardani et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam desa wisata dapat berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Novandi dan Adi (2021) juga menunjukkan bahwa CBT dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Temuan Kampoeng Cemplongan juga memperlihatkan bahwa manfaat wisata tidak harus selalu berbentuk pendapatan langsung dari

tiket masuk atau pengelolaan objek wisata. Manfaat dapat muncul melalui kegiatan ekonomi pendukung yang dilakukan masyarakat di sekitar destinasi. Oleh karena itu, pengembangan wisata perlu dipandang sebagai ekosistem ekonomi lokal yang menciptakan hubungan antara pengelola wisata, pengunjung, dan UMKM.

Peluang tersebut masih menghadapi keterbatasan karena wisata belum dibuka secara rutin. Dengan demikian, penguatan CBT di Kampoeng Cemplongan membutuhkan peningkatan kontinuitas aktivitas wisata sehingga masyarakat dapat memperoleh kesempatan usaha yang lebih konsisten.

Dukungan Pemerintah Desa terhadap Pengembangan Wisata

Hasil wawancara dengan kepala desa menunjukkan adanya dukungan terhadap pengembangan kawasan Cemplongan. Salah satu rencana yang disampaikan adalah pembangunan pagar keliling apabila tersedia dana. Pagar tersebut dimaksudkan untuk mengatur akses kawasan inti agar masyarakat tidak bebas keluar-masuk dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan dengan lebih tertib.

Dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melihat kebutuhan pengelolaan kawasan secara lebih teratur. Pembangunan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola akses dan perlindungan kawasan wisata. Dalam perspektif collaborative governance, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai fasilitator yang dapat menghubungkan kepentingan pengelola, masyarakat, dan kegiatan ekonomi lokal. Dukungan pemerintah desa perlu diarahkan tidak hanya pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada penyusunan mekanisme pengelolaan, pembagian peran, jadwal operasional, serta strategi pengembangan ekonomi masyarakat.

Penelitian Ningtias et al. (2024) menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi modal penting dalam mempercepat pengembangan desa wisata berkelanjutan. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa dukungan pemerintah desa perlu berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat.

Persepsi Positif Masyarakat terhadap Keberadaan Desa Wisata

Hasil wawancara dengan pengunjung dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya penerimaan positif terhadap keberadaan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan. Keunikan air Cemplongan yang menurut masyarakat tidak habis meskipun musim kemarau dipandang sebagai daya tarik yang membedakan kawasan tersebut dari tempat lain. Tokoh masyarakat dan perangkat desa juga menyampaikan bahwa keberadaan wisata memberikan kebanggaan tersendiri karena desa memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan. Selain itu, terdapat

harapan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan tambahan pendapatan bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Persepsi positif tersebut merupakan modal sosial dalam pengembangan desa wisata. Partisipasi masyarakat akan lebih mudah dibangun apabila masyarakat melihat manfaat yang dapat diperoleh dari pengembangan destinasi. Penelitian Singgalen et al. (2023) menunjukkan bahwa kesiapan dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan desa wisata. Rachmawati dan Fitriyani (2024) juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa wisata. Dengan demikian, dukungan sosial terhadap Kampoeng Cemplongan sudah tersedia. Tantangannya adalah bagaimana dukungan tersebut diterjemahkan menjadi partisipasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Integrasi Nilai Ekonomi Syariah

Penelitian ini menunjukkan ekonomi syariah ditempatkan sebagai landasan nilai bagi pengembangan model, bukan sebagai klaim bahwa Desa Wisata Kampoeng Cemplongan telah menerapkan sistem wisata halal secara formal. Data lapangan yang diperoleh belum menunjukkan adanya sistem sertifikasi halal, standar halal formal, atau kelembagaan khusus wisata syariah. Oleh karena itu, interpretasi ekonomi syariah dibatasi pada prinsip yang dapat menjadi dasar pengelolaan manfaat ekonomi masyarakat.

Pengembangan wisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Demikian pula, upaya menciptakan peluang usaha bagi UMKM dan meningkatkan manfaat bagi desa dapat diarahkan pada prinsip keadilan dan kebermanfaatan bersama. Kajian Huda et al. (2022) menunjukkan bahwa pengembangan wisata halal membutuhkan strategi yang memperhatikan berbagai unsur dalam ekosistem pariwisata. Rachmattie et al. (2024) juga menunjukkan bahwa ekosistem halal tidak hanya berkaitan dengan simbol, tetapi membutuhkan praktik dan koordinasi antarlembaga agar nilai syariah dapat diterapkan secara nyata. Trishananto et al. (2024) menegaskan bahwa kebijakan wisata halal di Indonesia berkaitan dengan penerapan prinsip Islam dalam produk, layanan, dan tata kelola.

Berdasarkan temuan tersebut, integrasi ekonomi syariah dalam model Kampoeng Cemplongan lebih tepat diarahkan pada prinsip keadilan manfaat, amanah pengelolaan, transparansi, kemanfaatan bersama, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Apabila ke depan pemerintah desa dan pengelola ingin mengembangkan konsep wisata ramah muslim atau wisata halal, diperlukan kajian lanjutan dan standar yang lebih formal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sintesis Temuan Penelitian

Tabel berikut merangkum temuan utama penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian.

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi
Collaborative Governance	Pemerintah desa, BUMDes/Pokdarwis, masyarakat, dan UMKM terlibat dalam pengembangan wisata	Perlu penguatan koordinasi dan pembagian peran
Potensi wisata	Keunikan kawasan Cemplongan dan keberadaan air menjadi daya tarik lokal	Perlu dikembangkan menjadi aktivitas wisata yang lebih teratur
Community-Based Tourism	Masyarakat mulai terlibat dan UMKM mulai berjualan di sekitar kawasan	Perlu memperluas dan mempertahankan peluang ekonomi masyarakat
Operasional	Wisata lebih banyak dibuka saat Syawalan, Apitan, dan kegiatan tertentu	Perlu jadwal pembukaan secara berkala
Pemerintah desa	Mendukung pengembangan dan merencanakan pengaturan kawasan melalui pagar	Perlu dukungan fasilitas dan tata kelola;
Ekonomi syariah	Relevan sebagai landasan nilai kemanfaatan, keadilan, amanah, dan keberlanjutan	Perlu dirumuskan secara bertahap dalam tata kelola

Sumber: Hasil penelitian, diolah peneliti (2025).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Kampoeng Cemplongan bukan ketiadaan potensi maupun dukungan masyarakat, tetapi belum optimalnya kesinambungan pengelolaan. Potensi wisata sudah tersedia, masyarakat mulai memperoleh manfaat ekonomi, dan pemerintah desa memberikan dukungan. Karena itu, kebutuhan utama berada pada penguatan kolaborasi dan keberlanjutan operasional.

Model Collaborative Governance Berbasis Community-Based Tourism dan Ekonomi Syariah

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini merumuskan model collaborative governance yang menempatkan pemerintah desa, BUMDes/Pokdarwis, masyarakat, dan UMKM sebagai aktor utama. Pemerintah desa berfungsi sebagai fasilitator kebijakan dan dukungan infrastruktur. BUMDes/Pokdarwis berperan dalam pengelolaan dan operasional wisata. Masyarakat dan UMKM menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan peluang ekonomi.

CBT menjadi pendekatan yang memastikan masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat ekonomi. Sementara itu, ekonomi syariah menjadi landasan nilai yang mengarahkan pengembangan pada keadilan, amanah, kemanfaatan bersama, dan keberlanjutan. Model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

POTENSI LOKAL CEMPLO-NGAN



COLLABORATIVE GOVERNANCE

Pemerintah Desa – BUMDes/Pokdarwis – Masyarakat – UMKM



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* Berbasis *Community-Based Tourism* dan Ekonomi Syariah

Sumber: Dikonstruksi peneliti berdasarkan hasil penelitian (2025).

Model tersebut menunjukkan bahwa collaborative governance merupakan fondasi utama karena keberlanjutan desa wisata membutuhkan hubungan antara pemerintah desa, lembaga pengelola, masyarakat, dan pelaku UMKM. CBT berfungsi memastikan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi menjadi bagian dari proses pengembangan. Ekonomi syariah memberikan orientasi nilai agar manfaat ekonomi tidak hanya berpusat pada satu aktor, tetapi diarahkan pada kemanfaatan bersama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan model yang menghubungkan kolaborasi antaraktor, partisipasi masyarakat, peluang ekonomi UMKM, dan nilai ekonomi syariah dalam konteks Desa Wisata Kampoeng Cemplongan. Model tersebut tidak dimaksudkan sebagai model universal, tetapi sebagai model kontekstual yang dapat menjadi dasar penguatan pengelolaan desa wisata dengan karakteristik serupa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Kampoeng Cemplongan telah berlangsung melalui keterlibatan pemerintah desa, BUMDes/Pokdarwis, masyarakat, dan pelaku UMKM. Gagasan pengembangan wisata berawal dari pemanfaatan keunikan lokal kawasan Cemplongan dan kemudian berkembang menjadi aktivitas wisata yang dibuka terutama pada momentum tertentu, seperti Syawalan dan Apitan. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa potensi wisata dan dukungan masyarakat telah tersedia, tetapi keberlanjutan pengelolaan masih membutuhkan penguatan.

Pendekatan *Community-Based Tourism* terlihat dari munculnya keterlibatan masyarakat dan peluang ekonomi bagi UMKM di sekitar kawasan wisata. Keberadaan wisata telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berjualan yang sebelumnya belum tersedia di sekitar lokasi. Namun, manfaat ekonomi belum dapat berlangsung secara konsisten karena kegiatan wisata belum dibuka secara rutin.

Penelitian ini menghasilkan model *Collaborative Governance* berbasis CBT dan ekonomi syariah yang menempatkan pemerintah desa, BUMDes/Pokdarwis, masyarakat, dan UMKM sebagai aktor utama. Model tersebut mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan penguatan ekonomi lokal dengan nilai keadilan, amanah, kemanfaatan bersama, dan keberlanjutan. Implementasi model perlu diarahkan pada penguatan koordinasi, pembagian peran, pengaturan akses kawasan, pembukaan wisata secara berkala, dan pengembangan peluang usaha masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini adalah belum tersedianya data kuantitatif mengenai jumlah pengunjung, omzet UMKM, dan kontribusi pendapatan wisata terhadap pendapatan desa secara periodik. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan model ini melalui pengukuran dampak ekonomi secara kuantitatif serta mengkaji lebih lanjut kesiapan penerapan standar wisata ramah muslim atau wisata halal apabila konsep tersebut akan dikembangkan secara formal.

DAFTAR REFERENSI

- Ahyadi, D. K. K. N. Z. A. A. A. (2025). *MENINGKATKAN PARIWISATA RELIGIUS MELALUI SERTIFIKASI HALAL DAN KEMASAN KREATIF: PERSPEKTIF PENGEMBANGAN KOMUNITAS BERBASIS ASET*.
- Akbar, P. N. G., & Safira, A. M. (2023). Monitoring evaluation analysis of tourist village development: A case of Kemiren, Banyuwangi. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 17(1), 12–22. <https://doi.org/10.47608/jki.v17i12023.12-22>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

- Farel, F., Sutiarto, M. A., & Tunjungsari, K. R. (2023). Community empowerment and customary attachments support participation in Aan Tourism Village development. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 7(1). <https://doi.org/10.22437/jiituj.v7i1.26650>
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The role of community-based tourism in sustainable tourism village in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(7), e05466. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-038>
- Hidayat, C., Zeng, Y., Aditya, M. K., Wicaksono, H., & Taviprawati, E. (2026). Community-based tourism as a driver of rural transformation: A qualitative study of Cibeber Village, Purwakarta, West Java Province, Indonesia. *TRJ Tourism Research Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.30647/trj.v10i1.307>
- Huda, N., Rini, N., Muslikh, Hidayat, S., Takidah, E., Sari, D. P., & Husniyah, A. (2022). Strategic model for halal tourism development in Indonesia: A preliminary research. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.11849>
- Kurniawati, D. (2024). Implementasi Literasi Sains dalam Meningkatkan Pembelajaran Ilmu Alamiah Dasar Mahasiswa STAI Islamic Centre Demak. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 4(5).
- Maesaroh, I., Dewi, I. J., & Ginting, G. (2024). Tourists' attitudes towards halal tourism: The roles of place attachment and religiosity. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 18(1), 61–76. <https://doi.org/10.47608/jki.v18i12024.61-76>
- Maheswari, P. A., & Gustaman, F. A. (2024). Community participation in implementation of 4 pillars of sustainable tourism in Janti Tourist Village, Klaten. *Khazanah Sosial*, 6(4). <https://doi.org/10.15575/ks.v6i4.44301>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative governance in the management of Praiijng Tourism Village in Tebara Village, Waikabubak City District, West Sumba Regency. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Nanda Kadun, A. D., & Nurjaman, R. (2024). Factors affecting community participation in the Doyo Lama and Tobati Tourism Villages. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11887>
- Ningtias, K., Sudagung, A. D., Sari, V. Y., & Adiwinata, Y. K. (2024). The establishment of a sustainable tourism village in West Kalimantan, Indonesia: Case study of Pentek Sustainable Tourism Village at Mempawah Regency. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 22(3), 326–340. <https://doi.org/10.5614/ajht.2024.22.3.06>
- Novandi, H. R., & Adi, I. R. (2021). The impact of local economic development through community-based tourism on economic welfare of the community in Tamansari Village, Banyuwangi, East Java, Indonesia. *Indonesian Journal of Social Work*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.31595/ijsw.v5i1.406>
- Nurwanda, A., Daraba, D., Suprajogo, T., & Puspita, D. (2024). Collaborative governance in tourism village development in Ciamis Regency, West Java Province, Indonesia. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 362–375. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1149>
- of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.

- Palupi, S., Bahri, A. S., Aditantri, R., Baskoro, A., & Priyanto, S. H. (2024). Integration of community-based on tour packages to realize a sustainable tourism village: The case of Penadaran Tourism Village Grobogan Regency Central Java. *E-Journal of Tourism*, 11(1), 153–165. <https://doi.org/10.24922/eot.v11i1.111366>
- Prabawati, N. P. A., & Supriliyani, N. W. (2023). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 11(2). <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2023.v11.i02.p21>
- Prasetyo, H. (2023). Management of tourism villages with collaborative governance in Kebumen District. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 13(1), 49–58. <https://doi.org/10.31289/jap.v13i1.8730>
- Rachmawati, D., & Fitriyani, L. R. (2024). Community participation in developing Penglipuran Village in Bali as tourism village. *Humaniora*, 15(1). <https://doi.org/10.21512/humaniora.v15i1.11007>
- Rachmatie, A., Setiawan, E., Zakiah, K., Saud, M., & Martian, F. (2024). Halal tourism ecosystem: Networks, institutions and implementations in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 15(11), 3247–3265. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2023-0286>
- Singgale, Y. A., Laturiuw, A. K., Puspitarini, T., & Insani, Z. A. P. (2023). Community participation in tourism development in the village: Examining from Subang District, Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 7(1), 105–118. <https://doi.org/10.19109/jssp.v7i1.14737>
- Trishananto, Y., Mas'ud, F., Setiawan, & Fauziah, U. N. (2024). Formulating policies for halal tourism in Indonesia based on Islamic law. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 24(1), 47–70. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i1.47-70>
- Wardani, P. A., Rahmanita, M., Farhan, M., & Pramudita, R. F. (2023). Community participation in tourism destination development: Lesson from Kelor Tourism Village. *Journal of Language, Communication, and Tourism*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.25047/jlct.v1i2.3987>